



## Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam

Martina<sup>1</sup>, Fitri Sarinda<sup>2</sup>, Dwi Noviani<sup>3</sup>, Hilmin<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Al-Ittifaqiah Indralaya<sup>1234</sup>

Email : [tinamartina054@gmail.com](mailto:tinamartina054@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitrisarinda327@gmail.com](mailto:fitrisarinda327@gmail.com)<sup>2</sup>, [dwi.noviani@iaiqi.ac.id](mailto:dwi.noviani@iaiqi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[hilmin@iaiqi.ac.id](mailto:hilmin@iaiqi.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

Email korespondensi: [dwi.noviani@iaiqi.ac.id](mailto:dwi.noviani@iaiqi.ac.id)

**Abstrack.** *Democratization in Islamic education is an approach that emphasizes democratic principles to achieve an inclusive and fair education system in accordance with Islamic teachings. This concept involves the active participation of all members of the educational community, ensuring inclusivity, and developing students' skills. In this abstract, we will explain the essence of the democratization of education in Islam and its impact on the development of a generation that has morals and makes positive contributions to society. The democratization of education in Islam includes the development of leadership skills and values. Islam teaches the values of fair and responsible leadership. Therefore, a democratic education system in an Islamic context must pay special attention to the formation of students' character and leadership, so that they can contribute positively to society. Democratization of education in Islam is not just the implementation of the concept of democracy in educational practice, but also reflects Islamic values that encourage justice, equality and active participation. By understanding and applying these principles, Islamic education can be a means of producing a generation that is not only academically intelligent, but also has noble character and is able to play an active role in building a just and harmonious society.*

**Keywords:** *Democracy, Islamic education*

**Abstrak.** Demokratisasi dalam pendidikan Islam adalah suatu pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi untuk mencapai sistem pendidikan yang inklusif dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini melibatkan partisipasi aktif semua anggota masyarakat pendidikan, memastikan inklusivitas, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan peserta didik. Dalam abstrak ini, kami akan menjelaskan esensi demokratisasi pendidikan dalam Islam dan dampaknya terhadap pengembangan generasi yang berakhlak dan berkontribusi positif dalam masyarakat. demokratisasi pendidikan dalam Islam mencakup pengembangan keterampilan dan nilai-nilai kepemimpinan. Islam mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang demokratis dalam konteks Islam harus memberikan perhatian khusus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan peserta didik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. demokratisasi pendidikan dalam Islam bukan hanya sekadar implementasi konsep demokrasi dalam praktik pendidikan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

**Kata kunci :** Demokrasi dan Pendidikan Islam

### A. PENDAHULUAN

Peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan akan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa (Nations character building). Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada komunitas lingkungan sosial-politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan nilai tata kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang di anut oleh suatu pemerintahan.

Pada kondisi Negara yang memiliki masyarakat heterogenitas, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga, pada gilirannya dapat membentuk kondisi *community development* pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun berkreasikan. Agar semakin demokratis pelaksanaan pendidikan suatu Negara, akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran, tenaga, dan suaranya. Impact yang sangat kuat dari penerapan demokrasi pendidikan yaitu berkembangnya keberagaman pola pikir masyarakat, kreatifitas, dan daya inovasi yang tinggi.

Demokratisasi pendidikan dalam Islam adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa pendidikan dalam konteks Islam dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kelamin mereka. Konsep ini berakar dalam nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan.

Islam mengajarkan bahwa semua individu memiliki kesetaraan di hadapan Allah. Oleh karena itu, konsep demokratisasi pendidikan dalam Islam mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Demokratisasi pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok marginal, memiliki akses yang sama ke pendidikan. Ini berarti bahwa sistem pendidikan dalam masyarakat Islam harus memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan dianggap sebagai amal saleh dalam Islam, yang berarti bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter yang baik dan berkontribusi positif pada masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus mencakup aspek moral dan etika. Sejarah Islam mencatat berbagai contoh pendekatan demokratisasi pendidikan. Misalnya, pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, ia membuka sekolah-sekolah dan memberikan hak pendidikan kepada semua warga Muslim tanpa memandang status sosial. Dalam dunia modern, konsep demokratisasi pendidikan dalam Islam dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk akses pendidikan yang merata di

seluruh dunia Muslim, kualitas pendidikan, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan modern.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukminingsih et al., 2020). Penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas tentang tema dengan cara menumpulkan berbagai sumber dari literatur berupa buku, jurnal, makalah, dan tulisan lainnya, sesuai dengan kajian yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam adalah dokumentasi, atau mengumpulkan informasi dari buku, literatur, dan artikel jurnal. Data yang digunakan berupa data sekunder. Data skunder diperoleh dari berbagai sumber, baik dari buku, hasil penelitian dan atikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis content, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Beberapa tahapan dalam analisis ini, diantaranya: Pertama, tahap deskripsi atau orientasi yaitu dimana peneiti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan; Kedua adalah tahap reduksi, pada tahap ini penulis mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu, data yang perlu disortir adalah data yang bersifat menarik, penting berguna dan baru; dan Ketiga adalah tahap seleksi, pada tahap ini penulis menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam**

Pendidikan yang bersifat demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian, saling menunjang beragam hubungan demokrasi dan pendidikan. Melalui pendidikan,

anak dipersiapkan menjadi manusia yang terkelola. Hanya layanan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang disediakan oleh pendidikan. Pendidikan demokratis diartikan sebagai pendidikan yang memberikan dukungan jangka panjang kepada setiap anak (siswa) untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran berbasis sekolah yang semakin menantang berdasarkan kemampuannya. Pembelajaran pendidikan yang adil yang ditawarkan oleh seluruh anggota masyarakat adalah demokrasi pendidikan..<sup>1</sup>

Sebagaimana amanat UUD 1945 mengatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Pendidikan yang mencerdaskan rakyat adalah pendidikan yang membawa warga negaranya sebagai anggota masyarakat demokratis. Proses pendidikan yang demikian bukanlah proses indoktrinasi tetapi menyadarkan rakyat akan hak-haknya dan memberikan kemampuan pada rakyat untuk secara bersama-sama mewujudkan keadilan dan kemakmuran Bersama. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam.<sup>2</sup>

Mengacu pada karakteristik demokrasi di atas, maka prinsip-prinsip demokrasi dapat pula diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu (peserta didik) untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya dalam menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi yang telah dibawanya sejak lahir.<sup>3</sup>

Secara etimologis, Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan sosial. Beranjak dari konsepsi musyawarah inilah Islam memperkenalkan gagasan demokrasi, yakni gagasan yang mengharuskan seluruh proses pendidikan melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Irawan Irawan and Denny Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 626–31, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254>.

<sup>2</sup> Mukhtasar Zainuddin, "Konsep Demokrasi Dalam Islam" XVI (2008): 15–27.

<sup>3</sup> Ahmad Sugini, "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam" 22 (2019): 1–7, <http://eprints.unwahas.ac.id/2196/>.

<sup>4</sup> Irawan and Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam."

Demokratisasi pendidikan dalam Islam mengacu pada upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka nilai dan ajaran Islam. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam Islam melibatkan inklusi, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan.<sup>5</sup>

- 1) Inklusi adalah Demokratisasi pendidikan dalam Islam menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini mencakup pendidikan untuk anak-anak, dewasa, pria, dan Wanita.
- 2) Prinsip keadilan dalam Islam sangat penting dalam konteks pendidikan. Ini mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan peningkatan kesempatan pendidikan bagi semua.
- 3) Demokratisasi pendidikan dalam Islam mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ini termasuk siswa, orang tua, guru, dan komunitas lokal. Keputusan-keputusan penting seharusnya tidak hanya diambil oleh otoritas pendidikan, tetapi juga melibatkan suara dan perspektif beragam.
- 4) Prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial.
- 5) Konsistensi dengan Nilai Islam, Demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk memastikan bahwa pendidikan mendukung perkembangan moral, etika, dan spiritual siswa sesuai dengan ajaran Islam.

Demokratisasi pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kesempatan bagi semua individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan umat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan intelektual, dan pengembangan karakter dalam kerangka ajaran Islam.<sup>6</sup>

Nilai-nilai demokrasi dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit seperti dalam konsep demokrasi yang ditemukan dalam pemikiran politik modern. Namun, terdapat beberapa prinsip dan nilai dalam Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan prinsip-

---

<sup>5</sup> Usri, "Pendidikan Islam Dan Demokrasi," *Al-Mutsila* 1, no. 2 (2021): 82–104, <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.10>.

<sup>6</sup> Joni Rahmat Pramudia, "Demokrasi Dalam Pendidikan" 4, no. 3 (2000): 1–8.

prinsip demokrasi, seperti partisipasi, keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang dapat diidentifikasi dalam Al-Quran yang relevan dengan konsep demokrasi:<sup>7</sup>

- 1) **Nilai Keadilan (Adl):** Al-Quran sangat menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan kesetaraan di mata hukum.
- 2) **Nilai-nilai Kebebasan:** Al-Quran menghormati kebebasan individu untuk berpikir, berpendapat, dan memilih agama mereka sendiri. Demokrasi juga mencakup hak individu untuk memiliki keyakinan dan berpendapat secara bebas. kaitannya dengan pendidikan, ajaran al-Qur'an tentang kebebasan berpikir dan bertindak paling tidak mengimplikasikan 4 hal pokok, yaitu: (1) pendidikan haruslah merupakan penciptaan situasi dan kondidi yang betul-betul kondusif bagi pengembangan 'aql atau daya nalar dan jism atau kemampuan berbuat peserta didik, (2) dalam setiap pembelajaran, peserta didik diberi kebebasan untuk berfikir kritis dan analitis mengenai berbagai hal, (3) peserta didik diberi kebebasan dalam berkreasi dan berbuat sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan (4) peserta didik diberi kebebasan dalam mengkomunikasikan ide, pikiran atau pandangannya tentang sesuatu.
- 3) **Nilai-nilai persamaan** Dalam Q.S al-Baqarah/2: 213 dinyatakan bahwa, "manusia adalah umat yang satu". Sebab pada hakikatnya semua manusia berawal dari yang satu yakni Adam a.s. yang dari dirinya Allah menciptakan perempuan yakni Hawa dan dari keduanya Allah Swt memperkembang biakkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan (lihat Q.S. an-Nisa'/4: 1 dan Q.S az-Zumar/39: 6 ). Hal ini merupakan penegasan bahwa pada prinsipnya manusia adalah sama, yakni berasal dari Adam a.s. Penegasan lain yang dipaparkan al-Qur'an adalah penegasan bahwa meskipun manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, namun semua manusia adalah sama. Satu-satunya ukuran yang membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya hanyalah kadar atau kualitas ketaqwaannya kepada Allah Swt.

Dalam konteks pendidikan, implikasi terpenting dari prinsip persamaan tersebut adalah menghapuskan semua hambatan yang memungkinkan seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) tidak bisa mengaktualisasikan diri dan potensi yang dimiliki. Karenanya, semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk

<sup>7</sup> Sugini, "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

memperoleh pendidikan dan perlakuan yang sama sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka pengembangan potensi yang dimiliki agar mampu meraih kualitas terbaik, yakni taqwa kepada Allah Swt.

- 4) **Nilai-nilai musyawarah** merupakan nilai-nilai dasar yang selalu diletakkan dengan demokrasi, bahkan ada yang menganggap sebagai doktrin yang paling pokok. Hal ini dikarenakan dalam sebuah tatanan kehidupan demokrasi, praktis semua hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama diperbincangkan dan diputuskan melalui musyawarah. Dalam Islam, konsep dan prinsip-prinsip tentang musyawarah tersebut terdapat dalam al-Qur'an bahkan ada surah yang diberi nama al-syura yang bermakna musyawarah. Menurut Rahardjo, syura sebenarnya suatu forum dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun-rembuk (memberikan saran), tukar pikiran, membentuk pendapat, dan memecahkan suatu persoalan Bersama. Perintah untuk bermusyawarah diperintahkan Allah Swt dalam Q.S. Ali-Imran/3 ayat 159 ayat ini memerintah kepada Nabi Saw agar bermusyawarah dengan umatnya dalam memutuskan berbagai hal. Pada ayat di atas, perintahkan musyawarah dihubungkan dengan sikap lemah lembut, pemaaf, memohon ampunan bagi kesalahan orang lain dan berserah diri kepada Allah setelah mengambil suatu keputusan Bersama.

Implikasi terpenting prinsip musyawarah ini dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah: (1) kesediaan untuk mendiskusikan berbagai persoalan, (2) kesediaan untuk mengemukakan pendapat, (3) kesediaan mendengarkan pendapat orang lain, (4) kesadaran dan kesediaan yang tulus untuk saling menerima dan menghormati perbedaan pendapat, baik antara sesama peserta didik maupun dengan pendidik, (5) kesediaan dan kedewasaan untuk menerima kenyataan bahwa kemungkinan sebahagian atau bahkan seluruh keinginan dan pendapat kita tidak diterima atau ditolak oleh peserta musyawarah, (6) kerelaan untuk menerima kompromi, (7) kesiapan dan kedewasaan untuk menerima hasil musyawarah dan melaksanakannya secara bertanggung jawab.

- 5) **Nilai-nilai Kemajemukan atau keanekaragaman** adalah kenyataan alamiah atau Sunnah Allah. Informasi al-Qur'an tentang diciptakannya manusia dari berbagai suku dan bangsa merupakan hujjah tentang eksistensi kemajemukan dalam Islam (lihat Q.S, al-Hujurat/49: 13). Selain suku bangsa, al-Qur'an juga mengakui adanya keanekaragaman bahasa dan warna kulit sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah (Q.S, ar-Rum/30: 22). Juga harus mengakui adanya

keanekaragaman keyakinan atau agama. Allah berfirman berfirman dalam Q.S, al-Maidah/4: 48.

- 6) Nilai-nilai toleransi** dalam alquran ada beberapa sikap toleran yang dituntut agar dikembangkan umat Islam dalam kehidupannya, yakni: (1) tidak boleh memaksakan kehendak, terutama dalam konteks menganut suatu keyakinan, (2) tidak boleh mencerca Tuhan atau sembahkan umat lain, (3) dilarang mengklaim kebenaran, sebab hakikat kebenaran hanya ada pada Allah Swt, (4) melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan membiarkan orang lain berbuat hal yang sama.

Seluruh nilai-nilai diatas, keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, kemajemukan dan toleransi, merupakan fundamenta atau dasar-dasar bagi menata kehidupan yang demokrasi, termasuk demokrasi dalam pendidikan umum maupun Islam. Untuk itu, jika kita menginginkan praktik pendidikan yang demokrasi, maka seluruh nilai-nilai di atas harus diimplementasikan dalam sebuah proses atau praktik pendidikan.

## 2. Problematika Demokrasi Pendidikan Islam

Problem metodologis dalam pendidikan Islam sampai hari ini belum pernah terselesaikan secara tuntas. Pembahasan mengenai problem tersebut selalu terhambat oleh aturan-aturan yang membatasi pemikiran ilmiah secara sempit dalam ortodoksi klasik. Dengan adanya pembatasan tersebut melahirkan pembakuan atau standarisasi sebuah pemikiran dan hanya satu pemikiran saja yang di anggap benar.<sup>8</sup> Pemikiran yang berada di luar aturan tersebut termasuk murtad dan memasuki wilayah larangan. Pemikiran dan karya intelektual yang segar dan dinamis yang mampu melakukan perubahan serta menjadi mobilitas social sebagaimana yang di harapkan masyarakat mustahil akan lahir bila idiologi ilmiah yang dianggap standart tersebut masih berperan secara vital serta mengawasi dan mengontrol secara ketat pengembangan dakwah Islam dan seluruh aktifitas pendidikan Islam yang meliputi proses pembelajaran dan penyusunan kurikulumnya.<sup>9</sup>

Pengembangan pemikiran dan pendidikan Islam pada umumnya masih berada pada proses pembersihan pemikiran Islam yang hanya terpusat pada hasil pemikiran klasik yang ortodok. Padahal hasil pemikiran tersebut tidak mutlak keberadaannya, serta kesemuanya belum tentu relevan bila di terapkan pada kondisi hari ini. Bukan berarti pula kita menolak keseluruhan dari pemikiran klasik tersebut, tetapi perlu dilakukan verifikasi dan kajian

<sup>8</sup> Anistianingsih Anistianingsih, Nursyahrani Fahmin, and Kasyful Anwar, "Demokrasi Dalam Pendidikan Islam," *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan* 3, no. 4 (2023): 202–10.

<sup>9</sup> Anistianingsih, Fahmin, and Anwar.

ulang hasil pemikiran tersebut sebagaimana kritikan yang dilakukan Al Ghazali terhadap filsafat empiris dan rasional. Karena yang dilakukan Al Ghazali merupakan bukti bila ia berfilsafat, dan penolakan yang dilakukan bukan pada metodologi filsafatnya tetapi hasil final dari filsafat empiris dan ilmiah tersebut.<sup>10</sup>

Demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak di tentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelolah, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Disisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efesiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan Masyarakat.<sup>11</sup>

Metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam sebenarnya banyak terpengaruh oleh prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam sendiri sejak kelahirannya selalu menyerukan adanya prinsip kebebasan dan persamaan dalam belajar, sehingga terbukalah jalan untuk belajar bagi semua orang, pintu masjid dan institute-institute terbuka untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan antara si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan sosial seorang siswa, oleh karena didalam Islam tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan arab, kecuali dari taqwanya.<sup>12</sup>

Dalam menciptakan pendidikan Islam yang lebih demokratis dan dalam rangka menghadapi perubahan masyarakat global, ada beberapa persoalan mendasar internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:<sup>13</sup>

1) Pertama harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang di bawa Al-Qur'an, berupa persoalan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus di jauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kali harus di lakukan adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi

---

<sup>10</sup> Siti Romlah, "Demokrasi Pendidikan Islam" 13, no. 2 (2018): 1–11, blob:<http://ejournal.kopertais4.or.id/45f7145b-082d-45a7-85d2-bf2c456e1735>.

<sup>11</sup> Romlah.

<sup>12</sup> MUHAMMAD ROIHAN DAULAY, "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 91, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632>.

<sup>13</sup> Romlah, "Demokrasi Pendidikan Islam."

proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan memaksa proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas muslim ini. Azyumardi, menekankan bahwa perubahan bentuk dan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari tuntunan perubahan zaman. Menurutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memiliki visi keislaman, kemodernan, kekinian, masa depan dan kemanusiaan agar compatible dengan perkembangan zaman.

- 2) Kedua, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Artinya lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi untuk memenuhi keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal tersebut masih di rasakan apabila pendidikan Islam di pandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan spiritual, etika dan moral ilahiyah. Memang diakui, bahwa peserta didik secara verbal kognitif dapat memahami ajaran Islam dan terampil dalam melaksanakannya, tetapi kurang menghayati kedalaman maknanya. ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral ilahiyah.

Selain persoalan tersebut, pendidikan Islam sekarang ini juga di hadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yakni bagaimana upaya untuk membangun paradigma baru pendidikan, manajemen dan organisasi, metode pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetitif dan proaktif dalam dunia masyarakat modern, global dan informasi.

Problematika demokrasi dalam konteks pendidikan Islam adalah isu kompleks yang melibatkan sejumlah masalah dan pertimbangan.

- 1) Kurikulum pendidikan Islam mungkin cenderung menjadi lebih dogmatis dan kurang inklusif terhadap pandangan yang berbeda. Hal ini dapat menghambat demokrasi dalam Pendidikan
- 2) Kebijakan Pendidikan Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim mungkin memiliki kebijakan pendidikan yang kurang mendukung kebebasan akademik dan demokrasi dalam sistem pendidikan mereka.
- 3) Keterbatasan Gender dalam Pendidikan Diskriminasi gender dalam pendidikan Islam bisa menjadi hambatan serius untuk demokrasi dalam pendidikan.

- 4) Kebebasan Beragama dan Berpikir: Beberapa kasus dapat menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berpikir dalam konteks pendidikan Islam, yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- 5) Partisipasi Siswa dan Demokrasi Sekolah, Demokrasi dalam pendidikan Islam juga melibatkan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah.

### **3. Implementasi demokrasi pendidikan Islam**

Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang di gunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya kuat. Tawaran Hasim Amir ini, yang di kutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai konsep demokratisasi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia, yaitu<sup>14</sup>.

#### **1) Pendidikan integralistik**

Merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: pendidikan yang berorientasi pada rabbaniyah [ketuhanan], insaniyah (kemanusiaan) dan alamiyah [alam pada umumnya], sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan rahmatan lil 'alamin, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmanirohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang memiliki integralitas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan (Teosentris), artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut.

#### **2) Pendidikan yang humanistik**

---

<sup>14</sup> Mukhtasar Zainuddin, "Konsep Demokrasi Dalam Islam."

Merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia (humanisasi), yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan di perlakukan dengan adil, hak untuk menyuarahkan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya. Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk. Maka, manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

### 3) Pendidikan pragmatic

Pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual ilahiyah. Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhankebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

### 4) Pendidikan yang berakar

pada budaya Yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain.

#### **D. KESIMPULAN**

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan demokrasi memiliki hubungan yang erat karena pendidikan dalam demokrasi akan memperlakukan anak-anak secara setara. Melalui pendidikan, seorang anak diposisikan sebagai manusia yang mengabdikan pada kemanusiaan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan Islam bersumber dari prinsip-prinsip Islam, atau dengan kata lain demokrasi Islam dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa masalah internal pendidikan Islam yang perlu diatasi sesegera mungkin untuk memajukan pendidikan Islam yang lebih demokratis dan secara efektif mengatasi pergeseran populasi global. Hal ini termasuk: Pertama dan terpenting, kita perlu merangkul semua ajaran Islam yang tidak ada dalam diri kita sendiri. sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Keduanya harus mempertimbangkan kembali tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam.

Nilai-nilai Demokrasi dalam al-Qur'an, (1) nilai-nilai keadilan, (2) nilai-nilai kebebasan, (3) nilai-nilai persamaan, (4) nilai-nilai musyawarah, (5) nilai-nilai kemajemukan, (6) nilai-nilai toleransi. pengembangan demokrasi pendidikan islam. Pendidik hendaknya memposisikan peserta didiknya sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran, harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, syarat dengan perintah dan intruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Islam memberikan dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan karena demokrasi pendidikan itu akan melahirkan kemajuan-kemajuan yang berarti bagi umat manusia. Maka dari praktek pendidikan yang demokratis inilah lahir kaum intelektual dan ulama-ulama besar yang berfikir bebas.

#### **E. REFERENSI**

- Anistianingsih, Anistianingsih, Nursyahrani Fahmin, and Kasyful Anwar. "Demokrasi Dalam Pendidikan Islam." *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan* 3, no. 4 (2023): 202–10.
- DAULAY, MUHAMMAD ROIHAN. "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 91. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632>.
- Irawan, Irawan, and Denny Hermawan. "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 626–31. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254>.

- Mukhtasar Zainuddin. "Konsep Demokrasi Dalam Islam" XVI (2008): 15–27.
- Munir, Abdul Mulhan, Paradigma Intelektual Muslim, *Pengantar Filsafat pendidikan Islam*, Yogyakarta, SIPRES, 1993
- Pramudia, Joni Rahmat. "Demokrasi Dalam Pendidikan" 4, no. 3 (2000): 1–8.
- Rahman, Fazlur., *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka. 198
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia
- Romlah, Siti. "Demokrasi Pendidikan Islam" 13, no. 2 (2018): 1–11.  
blob:<http://ejournal.kopertais4.or.id/45f7145b-082d-45a7-85d2-bf2c456e1735>.
- Sugini, Ahmad. "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam" 22 (2019): 1–7.  
<http://eprints.unwahas.ac.id/2196/>.
- Usri. "Pendidikan Islam Dan Demokrasi." *Al-Mutsla* 1, no. 2 (2021): 82–104.  
<https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.10>.